

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional.

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7 3' dan 7 5' Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.

Dataran Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah perikanan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81 %. Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian meliputi 29,20%.

4.1.2. Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo berlokasi di jalan Pahlawan No. 56 Sidoarjo sejak awal tahun 2001 dimana sebelumnya bertempat di jalan Sultan Agung No. 17A Sidoarjo.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki sarana dan prasarana, yaitu berupa kendaraan roda dua berjumlah 65 buah, kendaraan roda empat berjumlah 7 buah, komputer berjumlah 18 buah, mesin ketik berjumlah 20 buah dan internet 1 unit.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab terhadap Pajak Daerah dalam hal ini termasuk Pajak Reklame tetapi dalam proses pemungutannya dibantu oleh Starindo.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai visi, misi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, antara lain sebagai berikut:

- a. Visi adalah optimalisasi Pendapatan Daerah menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Misi adalah peningkatan PAD dan pelayanan masyarakat, meningkatkan PAD melalui serangkaian tindakan peningkatan dibidang profesionalisme dan budaya kerja aparat serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Tujuan adalah meningkatkan PAD yang lebih representatif, penetapan target PAD didasarkan analisa perhitungan potensi aktual sehingga lebih rasional dan realistis.
- d. Sasaran adalah tercapainya target PAD, target PAD yang telah ditetapkan secara realistis dan rasional akan dapat dicapai dengan mengarahkan dan menggerakkan

segala sumber seperti personil, sarana/prasarana dan biaya serta dukungan infrastruktur, yang direncanakan dan dilaksanakan secara konsistns, efektif dan efisien.

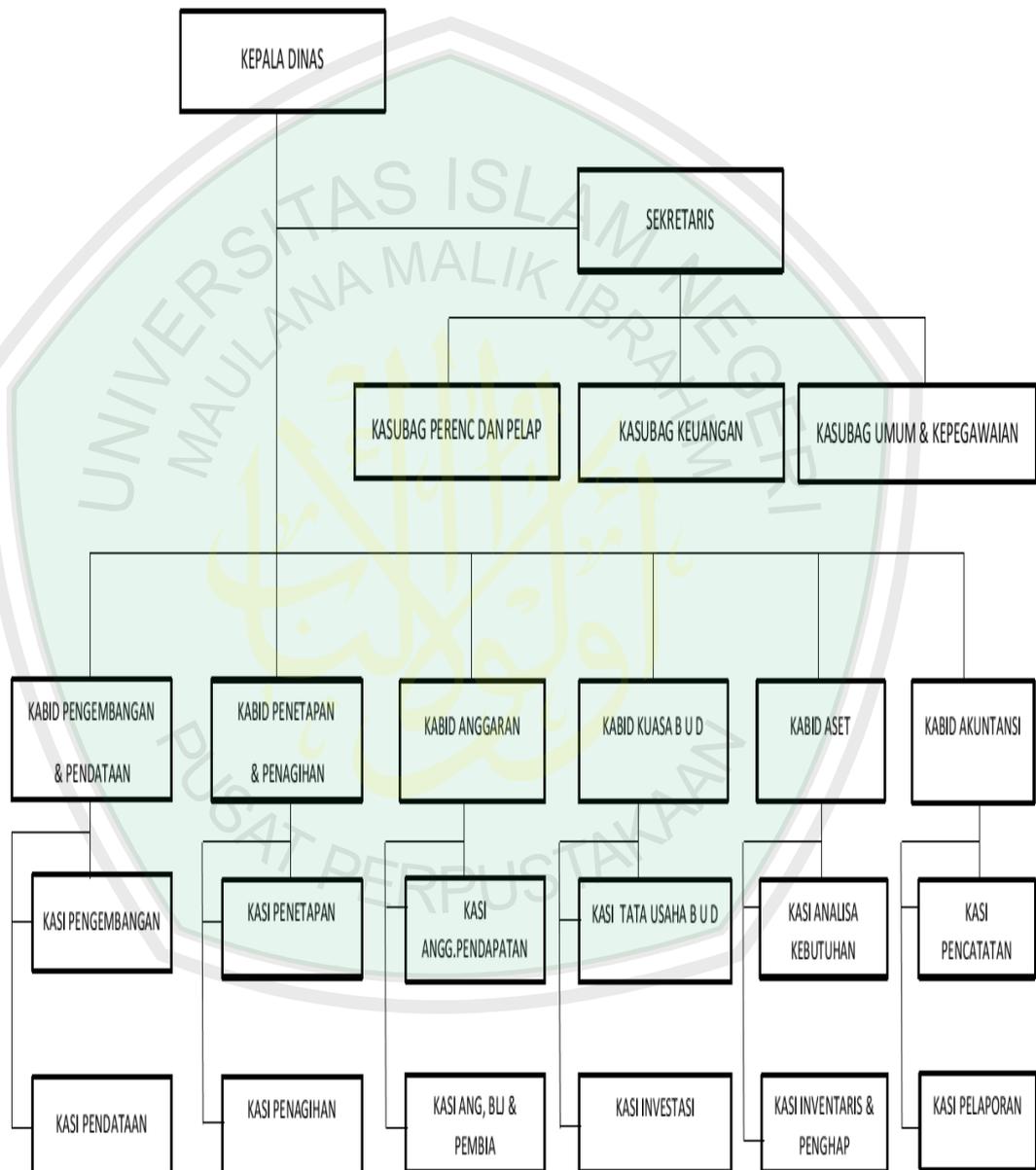
Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo terkait tugas dan wewenang telah diatur pada suatu struktur organisasi. berikut struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo :



STRUKTUR

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAHAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2013



Gambar : 4.1

Struktur Organisasi di DPPKAD Kab. Sidoarjo

adapun tugas – tugas dari setiap bagian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Tugasnya adalah memimpin, melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan penyelenggara kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas mempunyai fungsi :

- Perencanaan program bidang pengembangan dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, kuasa BUD, aset akuntansi serta kesekretariatan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja.
- Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis.
- Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- Pengelolaan administrasi keuangan.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis.
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
- Melaksanakan pengelolaan barang.
- Melaksanakan administrasi kepegawaian.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Sub Bagian Keuangan

- Menyusun rencana kebutuhan anggaran.
- Mengelola administrasi keuangan.
- Menyusun laporan pengelolaan keuangan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pengembangan dan Pendataan

Bidang pengembangan dan pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset di bidang pengembangan dan pendataan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan Pendataan.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pendataan.
- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan dan pendataan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Pengembangan

- Menyiapkan penyusunan program bidang pengembangan.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pengembangan.
- Melaksanakan perencanaan pengembangan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.
- Menyiapkan penyusunan dan melaksanakan strategi pengembangan dan pengendalian operasional terhadap objek pendapatan daerah.
- Melaksanakan ketatausahaan bidang pengembangan dan pendataan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Seksi Pendataan

- Menyiapkan penyusunan program bidang pendataan.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pendataan.
- Melaksanakan pendataan, pendaftaran dan penyuluhan wajib pajak.
- Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Bidang Penetapan dan Penagihan

Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di bidang penetapan dan penagihan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang penetapan dan penagihan.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penetapan dan penagihan.
- Pelaporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.

j. Seksi Penetapan

- Menyiapkan penyusunan program bidang penetapan
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang penetapan.
- Melaksanakan perhitungan, penetapan, pemeriksaan pembukuan pajak daerah.

- Melaksanakan ketatausahaan bidang penetapan dan penagihan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

k. Seksi Penagihan

- Menyiapkan penyusunan program bidang penagihan.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang penagihan.
- Melaksanakan penagihan, pembukuan penerimaan dan pelayanan keberatan, keringanan dan angsuran pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya.

l. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di bidang anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

m. Seksi Anggaran Pendapatan

- Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran pendapatan.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran pendapatan.
- Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan.
- Melaksanakan ketatausahaan bidang anggaran.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

n. Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan

- Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran belanja dan pembiayaan.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran belanja dan pembiayaan.
- Melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pembiayaan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

o. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah

Bidang Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di bidang kuasa bendahara umum daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang tata usaha BUD dan investasi.

- Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata usaha BUD dan investasi.
- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang tata usaha BUD dan investasi.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

p. Seksi Tata Usaha BUD

- Menyiapkan penyusunan program tata usaha BUD.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang tata usaha BUD.
- Melaksanakan penata usahaan kegiatan bendahara umum daerah serta penyimpanan uang daerah.
- Melaksanakan ketata usahaan bidang kuasa BUD.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

q. Seksi Investasi

- Menyiapkan penyusunan program dan koordinasi bidang investasi.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang investasi.
- Melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan atau penatausahaan investasi daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dengan bidang tugasnya.

r. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset di bidang aset. Dalam melaksanakan tugas Bidang Aset mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan.
- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

s. Seksi Analisa Kebutuhan

- Menyiapkan penyusunan program bidang analisa kebutuhan data.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang analisa kebutuhan.
- Melaksanakan analisa kebutuhan barang milik daerah.
- Melaksanakan pengadministrasian kebutuhan barang daerah.
- Melaksanakan ketata usahaan bidang aset.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

t. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan

- Menyiapkan penyusunan program bidang inventarisasi dan penghapusan.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang inventarisasi dan penghapusan.
- Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, penilaian, pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengelola serta penyimpanan seluruh bukti kepemilikan.
- Melaksanakan penghapusan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) barang milik daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

u. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) di bidang akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pencatatan dan pelaporan.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pencatatan dan pelaporan.
- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencatatan dan pelaporan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

v. Seksi Pencatatan

- Menyiapkan penyusunan program bidang pencatatan.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pencatatan .
- Melaksanakan pencatatan keuangan dan nilai kekeyaan daerah.
- Melaksanakan ketata usahaan bidang akuntansi.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

w. Seksi Pelaporan

- Menyiapkan penyusunan program bidang pelaporan.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pelaporan.
- Melaksanakan pelaporan belanja dan pembiayaan daerah.
- Melaksanakan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2. Penyajian Data

4.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1)

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Tabel 4.1
Rasio Kemandirian
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2011

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rasio Kemandirian
2002	192.350.500.000,56	569.340.200.000,00	79.350.210.000,00	29,65
2003	196.700.525.000,87	589.475.320.000,00	80.350.100.000,00	29,37
2004	199.320.450.000,87	590.200.310.000,00	82.670.230.000,00	29,62
2005	216.540.320.000,67	610.430.230.000,00	88.450.300.100,00	30,98
2006	208.250.670.000,54	698.510.000.000,00	93.200.200.000,00	26,30
2007	190.905.404.878,17	792.540.890.022,00	94.374.103.790,00	21,52
2008	213.693.758.966,37	855.643.531.652,00	112.262.694.054,00	22,08
2009	284.660.711.556,09	928.002.831.058,00	196.336.178.974,00	25,32
2010	356.161.848.548,24	969.298.842.540,00	349.372.790.057,08	27,01
2011	484.313.737.307,27	1.029.082.329.425,00	491.795.330.982,00	31,84

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 4.1 diketahui rasio kemandirian Kabupaten Sidoarjo tahun 2002-2011 dimana rasio tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 31,84%. Tren angka rasio kemandirian yang menunjukkan angka tren kenaikan hal ini dapat di katakan bahwa sumber dana eksternal. Dana eksternal sendiri meliputi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah dan ditetapkan pemerintah. Kabupaten Sidoarjo semakin meningkatkan dari tahun ke tahun.

4.2.2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (X₂)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 4.2
Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran	Rasio Efektifitas
2002	192.350.500.000,56	189.200.430.100,67	101,66
2003	196.700.525.000,87	190.270.433.078,53	103,38
2004	199.320.450.000,87	195.428.969.559,59	101,99
2005	216.540.320.000,67	213.216.330.030,32	101,56
2006	208.250.670.000,54	201.178.450.000,54	103,52
2007	190.905.404.878,17	178.206.361.792,17	107,13
2008	213.693.758.966,37	202.179.688.060,75	105,69
2009	284.660.711.556,09	258.422.578.156,98	110,15
2010	356.161.848.548,24	310.343.872.396,04	114,76
2011	484.313.737.307,27	427.071.360.790,38	113,40

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 4.2 diketahui rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2002 s.d. 2011. Tahun anggaran 2002 ke tahun anggaran 2003 mengalami kenaikan sebesar 1,71. Tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 1,39. Tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 0,43. Tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 3,61. Tahun anggaran 2007 ke tahun anggaran 2008 mengalami penurunan sebesar 2% dari 107,13 menjadi 105,56. di tahun anggaran 2008 ke anggaran 2009 mengalami kenaikan sebesar 5% dari 105,69 menjadi 110,15. di tahun anggaran 2009 ke anggaran 2010 mengalami kenaikan 4% dari 110,15

menjadi 114,76. di tahun anggaran 2010 ke tahun anggaran 2011 mengalami penurunan 1% dari 114,76 menjadi 113,40. dimana rasio tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 114,40%. Dari tahun 2007 s.d. 2011 angka rasio efektifitas menunjukkan presentase di atas 100%, maka dapat dikatakan selama masa penelitian kabupaten sidoarjo telah capai efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meralisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.

4.2.3. Rasio Pertumbuhan (X_3)

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Tabel 4.3
Rasio Pertumbuhan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2011

Tahun	PAD _{t0}	PAD _{t1}	Rasio Pertumbuhan
2002	189.200.430.100,67	190.270.433.078,53	0,57
2003	190.270.433.078,53	195.428.969.559,59	2,71
2004	195.428.969.559,59	213.216.330.030,32	9,10
2005	213.216.330.030,32	201.178.450.000,54	-5,65
2006	201.178.450.000,54	178.026.166.944,90	-11,51
2007	178.026.166.944,90	190.905.404.878,17	7,23
2008	190.905.404.878,17	213.693.758.966,37	11,94
2009	213.693.758.966,37	284.660.711.556,09	33,21
2010	284.660.711.556,09	356.161.848.548,24	25,12
2011	356.161.848.548,24	484.313.737.307,27	35,98

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 4.3 diketahui rasio pertumbuhan Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2007 s.d. 2011, mengalami fluktuasi. Dimana rasio tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 35,98%. Rasio pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu 7,23%. Pada tahun 2009 Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan PAD yang cukup signifikan sehingga rasio pertumbuhan juga meningkat sebanyak 22%,. pada tahun 2011 pun mengalami kenaikan PAD yang cukup signifikan sehingga rasio pertumbuhannya juga meningkat.hal ini di sebabkan kenaikan yang signifikan dari sisi PAD karena pelampauan pendapatan ini sebagian besar didapatkan dari perolehan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) yangmana mulai tahun 2011. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

4.2.4. Rasio Aktivitas (X_4)

Rasio aktivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. (Halim, 2004:18)

Tabel 4.4
Rasio Belanja Aparatur
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2011

Tahun	Belanja Aparatur	Total Belanja	Belanja Rutin APBD
2002	142.500.400.125,76	993.430.300.000,18	0,14
2003	145.999.651.625,00	995.790.120.000,75	0,15
2004	157.027.828.693,25	998.530.250.100,80	0,16
2005	111.184.803.278,80	1.001.450.130.200,75	0,11
2006	215.400.350.900,79	1.005.230.250.100,24	0,21
2007	487.338.439.794,00	1.024.336.480.177,24	0,48
2008	533.122.420.397,24	1.225.223.122.873,30	0,44
2009	541.226.254.291,59	1.371.659.766.870,92	0,39
2010	526.566.326.006,27	1.584.364.436.412,19	0,33
2011	662.794.510.249,94	1.828.757.388.074,71	0,36

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 4.4 diketahui rasio aktivitas Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2011 dimana semua rasio mempunyai nilai yang sama. Menunjukkan tren menurun hal ini berarti belanja aparatur dari tahun ke tahun semakin kecil. Berawal tahun 2007 sebesar 48% sampai dengan 2010 turun menjadi 33% namun pada tahun 2011 terhadap kenaikan sebesar 3% menjadi 36%.

Tabel 4.5
Rasio Belanja Pelayanan Publik
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2011

Tahun	Belanja Pelayanan Publik	Belanja Rutin APBD
2002	399.250.600.000,12	0,39
2003	407.460.250.000,45	0,42
2004	429.720.310.200,10	0,47
2005	469.200.360.100,23	0,49
2006	510.780.230.000,15	0,50
2007	536.998.040.383,24	0,52
2008	692.100.702.476,06	0,56
2009	830.433.512.579,33	0,61
2010	1.057.798.110.405,92	0,67
2011	1.165.962.877.824,77	0,64

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 4.5 diketahui belanja pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2011, rasio belanja pelayanan publik menunjukkan tren kenaikan yaitu dari tahun 2007 sebesar 52% sampai dengan tahun 2010 sebesar 67%. Pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 3% menjadi sebesar 64%. Sebab mengalami penurunan di karenakan dipergunakan untuk kenaikan gaji PNS (Pegawai Negri Sipil) sebesar 10%. Selain itu adanya kenaikan tunjangan perangkat desa sebesar 39.51% kenaikan tunjangan perangkat desa tersebut karena disamakan dengan upah minimum kabupaten sidoarjo.

4.2.5. Rasio Ekonomis (X₅)

Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (*spendingless*). Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomis, karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya (*cost reduction*).

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatandikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Tabel 4.6
Rasio Ekonomis
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Target Pengeluaran	Rasio Ekonomis
2002	23.450.520.000,10	24.510.350.200,15	95,68
2003	27.230.000.000,00	28.900.450.200,23	94,22
2004	11.312.767.557,95	11.900.560.000,45	95,06
2005	12.359.561.836,63	13.299.000.000,20	92,94
2006	23.560.900.100,98	23.990.560.000,78	98,21
2007	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	100
2008	42.812.000.000,00	43.886.897.330,21	97,55
2009	42.271.000.000,00	42.400.000.000,00	99,7
2010	29.897.414.946,00	40.269.414.946,00	74,24
2011	34.336.833.061,68	39.780.833.061,68	86,32

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 4.5 diketahui rasio ekonomis Kabupaten Sidoarjo tahun 2002 s.d. 2011 dimana rasio tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 100%. Kabupaten Sidoarjo mencapai tingkat pengelolaan keuangan ekonomis menunjukkan tren yang menurun terlihat di tahun 2007 sebesar 100%, saat tahun 2008. Hanya pada tahun 2007 mengalami tingkat ekonomis berimbang.

4.2.6. Variabel Terikat (Y)

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien

apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 4.7
Rasio Efisiensi
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2011

Tahun	Biaya Yg Dikeluarkan	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi
2002	18.700.450.000,10	192.350.500.000,56	9,72
2003	19.200.360.000,25	196.700.525.000,87	9,76
2004	20.900.350.100,12	199.320.450.000,87	10,49
2005	22.560.400.250,15	216.540.320.000,67	10,42
2006	27.800.510.300,10	208.250.670.000,54	13,35
2007	28.000.000.000,00	190.905.404.878,17	14,67
2008	42.812.000.000,00	213.693.758.966,37	20,03
2009	42.271.000.000,00	284.660.711.556,09	14,85
2010	29.897.414.946,00	356.161.848.548,24	8,39
2011	34.336.833.061,68	484.313.737.307,27	7,09

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel 4.6 diketahui rasio efisiensi Kabupaten Sidoarjo tahun 2007 s.d. 2011. Bahwa tahun anggaran 2007 ke tahun anggaran 2008 mengalami kenaikan sebesar 5,36% dari 14,67 menjadi 20,03%, ditahun 2008 ke tahun anggaran 2009 mengalami penurunan 5,18% dari 20,03% menjadi 14,85%, di tahun anggaran 2009 ke tahun anggaran 2010 mengalami penurunan sebesar 6,49% dari 14,85 menjadi 8,39% di tahun anggaran 2010 ke tahun anggaran 2011 mengalami penurunan sebesar 1,3% dari 8,39% menjadi 7,09%. dimana rasio tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 20,03%. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemda dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio di capai kurang dari satu (1) atau di bawah 100%.Maka dapat disimpulkan bahwa dengan semakin kecilnya angka rasio ini berarti menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik.

4.2.7. Analisis Data

4.2.7.1. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Menurut Santoso dalam Asnawi dan Masyhuri (2011:178) pengujian dalam sebuah model regresi, variabel *dependent*, variabel *independent* atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Sedangkan menurut Sulhan (2011:24) metode yang digunakan menguji normalitas adalah dengan menggunakan Uji Kolmogorow-Smirnov. Jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorow-Smirnov (K-S) $> 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi. Hasil ditunjukkan sebagai tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Asumsi Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		10
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45451212
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.081
	Negative	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		.363
Asymp. Sig. (2-tailed)		.999

Sumber : Data Primer (diolah), 2013

Hasil pengujian Output pada tabel 4.8 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,999 $> 0,05$. Maka asumsi dengan keseluruhan variabel, normalitas terpenuhi.

B. Uji Multikolonieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolonieritas pada penelitian dilakukan dengan matriks korelasi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolonieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*-nya. Apabila nilai matriks korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis terlepas dari gejala multikolonieritas. Kemudian apabila nilai *VIF* berada dibawah 10 dan nilai *Tolerance* mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolonieritas (Santoso, 2003).

Tabel 4.9
Nilai Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Rasio Kemandirian	,951	1,625
	Rasio Efektivitas	,705	1,181
	Rasio Pertumbuhan	,817	1,998
	Jumlah Belanja APBD	,716	1,975
	Rasio Ekonomis	,822	1,541

a. Dependent Variable: Rasio Esiensi

Dari tabel 4.9 di atas diketahui bahwa nilai *VIF* dari setiap variabel terbebas dari multikolinieritas, hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai *VIF* yang kurang dari 10.

C. Uji Autokorelasi

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada

problem auto korelasi.

Ada beberapa cara untuk melakukan pengujian terhadap asumsi autokolerasi, salah satunya Durbin-Watson d test mempunyai masalah yang mendasar yaitu tidak diketahuinya secara tepat mengenai distribusi dari statistik d itu sendiri. Namun demikian, Durbin dan Watson telah menetapkan batas atas (d_u) dan batas bawah (d_D). Durbin dan Watson telah mentabelkan nilai d_u dan d_D untuk taraf nyata 5% dan 1% yang selanjutnya dikenal dengan tabel Durbin dan Watson. Selanjutnya Durbin dan Watson juga telah menetapkan kaidah keputusan sebagai berikut :

Atau untuk kriteria pengambilan keputusan bebas autokorelasi juga dapat dilakukan dengan cara melihat nilai Durbin Watson, di mana jika nilai d dekat 2, maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi (M. Sulhan 2011: 22).

Tabel 4.10

Nilai Uji Autokolerasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.926(a)	.857	.679	1.18177	1.613

Sumber : Data Primer (diolah), 2013

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,613. Maka dari itu tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi.

D. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi ini bertujuan mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas, sedangkan model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi rank spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas (M. Sulhan 2011: 16). Hasil uji Heteroskedastisitas ditunjukkan sebagai tabel berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Variabel	sig	Keterangan
Rasio Kemandirian (X_1)	0,960 > 0.05	Homoskedastisitas
Rasio Efektifitas (X_2)	0,934 > 0.05	Homoskedastisitas
Rasio Pertumbuhan (X_3)	0,960 > 0.05	Homoskedastisitas
Rasio Aktivitas (X_4)	0,934 > 0.05	Homoskedastisitas
Rasio Ekonomis (X_5)	0,777 > 0.05	Homoskedastisitas

Sumber: Data primer (diolah), 2013

Dari hasil pengujian pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung *Heteroskedastisitas* melainkan *Homoskedastisitas*. Artinya tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan kesalahan (residual) semakin besar pula

E. Uji Linieritas

Penguji linearitas ini perlu dilakukan, untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linear atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan *curve estimation*, yaitu gambaran hubungan linear antara variabel X dengan variabel Y. Jika nilai sig $f < 0,05$, maka variabel X tersebut memiliki hubungan linear dengan Y (M. Sulhan 2011: 24). Hasil ditunjukkan sebagai tabel berikut.

Tabel 4.12
Hasil Uji Asumsi Linearitas

Dependent	Equation	R Square	df	F	Sig f
X ₁	Linier	0,716	8	20,13	0,002
X ₂	Linier	0,397	8	16,28	0,000
X ₃	Linier	0,382	8	14,22	0,000
X ₄	Linier	0,278	8	10,38	0,000
X ₅	Linier	0,396	8	16,20	0,003

Sumber: Data primer (diolah), 2013

Dari hasil menunjukkan semua nilai sigf < 0,05. Maka asumsi linieritas terpenuhi atau variabel tersebut memiliki hubungan linier dengan Y.

4.2.7.2. Uji Regresi Berganda

Menurut Asnawi dan Masyhuri (2011:182) uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (independent) secara bersama – sama terhadap variabel terikat (dependent). Pengujian regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian (X₁), rasio efektifitas (X₂), rasio pertumbuhan (X₃), rasio aktivitas (X₄), rasio ekonomis (X₅) terhadap rasio efisiensi (Y) seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.13
Nilai Uji Regresi Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	78,292	72,068		1,086	,338
	Rasio Kemandirian	1,831	,524	-,771	3,500	,009
	Rasio Efektivitas	-,470	,558	-,598	-,841	,447
	Rasio Pertumbuhan	,077	,111	,319	,690	,528
	Jumlah Belanja APBD	4,469	,711	,160	6,286	,000
	Rasio Ekonomis	1,345	,488	,091	2,756	,003

a. Dependent Variable: Rasio Esiensi

Dari tabel 4.10 Yaitu tabel nilai uji regresi berganda yang menyajikan hasil sebagai berikut :

1. Konstanta (a) = 78,292 menunjukkan besarnya kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian (X_1), rasio efektifitas (X_2), rasio pertumbuhan (X_3), rasio aktivitas (X_4), rasio ekonomis (X_5) terhadap adalah tetap, maka besarnya kinerja keuangan adalah 41,94325965. Hal ini menunjukkan nilai tetap variabel kinerja keuangan sebesar 78,292.
2. Koefisien regresi X_1 (rasio kemandirian) sebesar 1,831 (b_1), menunjukkan besarnya pengaruh X_1 (rasio kemandirian) terhadap kinerja keuangan, koefisien regresi bertanda positif menunjukkan X_1 (rasio kemandirian) berpengaruh searah terhadap kinerja keuangan (Y) sebesar 1,831.
3. Koefisien regresi X_2 (rasio efektifitas) sebesar -0,470 (b_2), menunjukkan besarnya pengaruh X_2 (rasio efektifitas) terhadap kinerja keuangan, koefisien regresi bertanda negatif menunjukkan X_2 (rasio efektifitas) berpengaruh terbalik terhadap kinerja keuangan (Y) sebesar -0,470.
4. Koefisien regresi X_3 (rasio pertumbuhan) sebesar 0,077 (b_3), menunjukkan besarnya pengaruh X_3 (rasio pertumbuhan) terhadap kinerja keuangan, koefisien regresi bertanda positif menunjukkan X_3 (rasio pertumbuhan) berpengaruh searah terhadap kinerja keuangan (Y) sebesar 0,077.
5. Koefisien regresi X_4 (rasio belanja APBD) sebesar 4,469 (b_4), menunjukkan besarnya pengaruh X_4 (rasio belanja APBD) terhadap kinerja keuangan, koefisien regresi bertanda positif menunjukkan X_4 (rasio belanja APBD) berpengaruh searah terhadap kinerja keuangan (Y) sebesar 4,469.

6. Koefisien regresi X_5 (rasio ekonomis) sebesar 1,345 (b_4), menunjukkan besarnya pengaruh X_5 (rasio ekonomis) terhadap kinerja keuangan, koefisien regresi bertanda positif menunjukkan X_5 (rasio ekonomis) berpengaruh searah terhadap kinerja keuangan (Y) sebesar 1,345.

4.2.8. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.8.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk menguji secara bersama-sama ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dengan menggunakan uji F. Pedoman yang digunakan apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka tidak ada pengaruh signifikan atau H_0 diterima dan H_a ditolak dan apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka ada pengaruh signifikan atau H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil menunjukkan sebagai tabel berikut.

Tabel 4.14

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	114.496	5	22.899	8.811	.008 ^a
	Residual	19.040	4	4.760		
	Total	133.536	9			

Sumber: Data primer (diolah), 2013

Dari hasil output tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa hasil signifikansi sebesar $0.008 < 0,05$ dan didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 8,811 Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,811 > 6,06$). Maka dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa secara besama-sama kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian (X_1), rasio efektifitas (X_2), rasio pertumbuhan (X_3), rasio aktivitas (X_4), rasio ekonomis (X_5) terhadap rasio efisiensi (Y).

4.2.8.2. Uji Signifikansi Pengaruh Partial (Uji T)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh indikator-indikator kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian (X_1), rasio efektifitas (X_2), rasio pertumbuhan (X_3), rasio aktivitas (X_4), rasio ekonomis (X_5) terhadap rasio efisiensi (Y). Pedoman yang digunakan apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka tidak ada pengaruh signifikan atau H_0 diterima dan H_a ditolak dan apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka ada pengaruh signifikan atau H_0 ditolak dan H_a diterima. Dan juga dilakukan dengan menggunakan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka ada pengaruh signifikan atau H_0 ditolak dan H_a diterima, dan apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh signifikan atau H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji simultan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Signifikansi Pengaruh Partial (Uji T)

Variabel	B (koefisien)	Beta	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig t	alpha	keterangan
X_1	1,831	-0,771	3,500	2,262	0,009	0,05	Ha : diterima
X_2	-0,470	-0,598	-0,841	2,262	0,447	0,05	Ha : ditolak
X_3	0,077	0,319	0,690	2,262	0,528	0,05	Ha : ditolak
X_4	4,459	0,160	6,286	2,262	0,000	0,05	Ha : diterima
X_5	1,345	0,091	2,756	2,262	0,003	0,05	Ha : Diterima

Hasil dari output uji parsial (uji t) pada tabel 4.21 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari pengujian uji t diketahui nilai rasio kemandirian daerah sebesar 3,500 dan tingkat signifikan sebesar 0,009, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah Pemkab Sidoarjo tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD karena dan menunjukkan hipotesis pertama terbukti. Maka

dapat dikatakan apabila kemandirian kabupaten sidoarjo, efisiensi PAD juga meningkat, maka perlu kemandirian pemerolehan pendapatan daerah.

2. Dari pengujian uji t diketahui nilai rasio efektifitas sebesar $-0,841$ dan tingkat signifikan sebesar $0,447$, hal ini menunjukkan bahwa rasio efektifitas daerah Pemkab Sidoarjo tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD dan menunjukkan hipotesis kedua tidak terbukti. Menunjukkan efektifitas penggunaan PAD yang berarti realisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran pendapatan yang disusun tidak serta-merta ukuran efisiensi penggunaan PAD.
3. Dari pengujian uji t diketahui nilai rasio pertumbuhan ekonomi sebesar $-0,690$ dan tingkat signifikan sebesar $0,528$, hal ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan ekonomi daerah Pemkab Sidoarjo tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD dan menunjukkan hipotesis ketiga tidak terbukti. Dalam kenaikan PAD dari tahun ke tahun positif berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD. Rasio pertumbuhan PAD positif akan menjamin efisiensi PAD itu sendiri, karena apabila biaya untuk materialisasi pendapatan juga besar maka efisiensi positif tercapai.
4. Dari pengujian uji t diketahui nilai rasio aktivitas daerah sebesar $6,286$ dan tingkat signifikan sebesar $0,000$, hal ini menunjukkan bahwa rasio aktivitas daerah Pemkab Sidoarjo berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD dan menunjukkan hipotesis keempat tidak terbukti. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui proporsi belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Oleh sebab itu

meskipun aktivitas Dinas Pendapatan Pengeluaran Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Sidoarjo tinggi belum bisa menjamin tercapainya tingkat efisiensi PAD. Banyaknya aktivitas juga akan menimbulkan biaya, sedangkan efisiensi PAD terjadi bila biaya pendapatan kurang dari 100% berarti tidak efektif.

5. Dari pengujian uji t diketahui nilai rasio usaha ekonomisasi PAD sebesar 2,750 dan tingkat signifikan sebesar 0,003, hal ini menunjukkan bahwa usaha ekonomisasi PAD Pemkab Sidoarjo berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD dan menunjukkan hipotesis kelima terbukti. Rasio ekonomis merupakan suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen maka semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintahan semakin baik. jadi semakin ekonomis PAD maka semakin efisien PAD.